



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BEKASI
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DICKY IRAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 420472

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.825.946.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/72 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 77.546.000
6. Tanah Seluas 1.746 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/323 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.998.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **310.700.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



3. MOTOR, YAMAHA XSR 155 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
30.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	132.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.129.567.275
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.398.513.275

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.398.513.275

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.